

# KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Rabu, 4 Maret 2020



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

## **KATA PENGANTAR**

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Media Indonesia Halaman 13	Senin, 2 Maret 2020	Program Pembangunan Infrastruktur PUPR 2020-2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan Rencana Strategis (Restra) dan Program kerja Pembangunan Infrastruktur 5 tahun ke depan. Hal itu dalam rangka melaksanakan visi Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Kabinet Indonesia Maju periode 2020 – 2024. Kelima visi Presiden tersebut ialah pembangunan sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi. “Kementerian PUPR, khususnya, akan melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti yang disampaikan Bapak Presiden, yakni melanjutkan dan menghubungkan apa yang telah kita bangun dengan Kawasan-kawasan khusus pariwisata, produksi, dan Kawasan industri,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, di Gedung DPR/MPR Selasa (12/11/2019). Raker perdana bersama Komisi V DPR tersebut dipimpin Ketua Komisi V DPR DI Lasarus.
2	Bisnis Indonesia Halaman 7	Selasa, 3 Maret 2020	PUPR Bangun Rumah Kusus	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penanganan pasca kerusakan di Wamena, Papua. Salah satu upayanya adalah melakukan pembangunan rumah khusus bagi warga yang menjadi korban. Dalam melaksanakan pembangunan rumah khusus tersebut, Kementerian PUPR bekerja sama dengan ZENI – TNI AD untuk membangun rumah tipe 36 sebanyak total 193 unit. Direktur Rumah Khusus Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Robert Marbun menyebutkan bahwa kerja sama yang dilakukan dengan ZENI-TNI AD adalah berupa kontrak swakelola tipe II.
3	Bisnis Indonesia Halaman 5	Selasa, 3 Maret 2020	Kementerian PUPR Siapkan Program Infrastruktur 2021	Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menekankan bahwa pemrograman infrastruktur pada 2021 harus berkesinambungan dengan pelaksanaan program tahun sebelumnya. “Melanjutkan KSPN 2021, ini perlu diprogramkan di konreg. Tahun ini ada lima yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, selesai 2020. Pada 2021 kita pindah, mungkin lima KSPN lagi. Misalnya, Wakatobi, Bromo, Toraja,” ujar Basuki dalam arahannya di acara konreg IV di Manado, Senin (2/3). Selain itu, kata Basuki, pihaknya juga melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan, seperti pembangunan bendungan dan jembatan. Basuki pun menargetkan penyelesaian 15 bendungan lagi sepanjang 2021.

4	Bisnis Indonesia halaman 21	Rabu, 4 Maret 2020	Akankah Disparitas Harga Berkurang?	Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartato mengatakan bahwa Trans-Papua yang merupakan jalan Nasional bukan tol sudah menjadi program pemerintah sejak dulu. "Jalan Trans-Papua sudah program dari dulu, untuk membuka keterisolasian sekaligus konektivitas. [Harapannya] supaya segera tersambung sehingga diharapkan tidak terlalu besar disparitas harga," katanya kepada Bisnis di Jakarta, Selasa (3/3). Jalan nasional Trans-Papua sepanjang 4.330 kilometer (km) berada di dua provinsi, yakni Papua dan Papua barat. Di Papua Barat jalan yang dibangun adalah sepanjang 1.070,55 km, sedangkan di Papua 3.259,45 km.
5	Tempo halaman Peristiwa 3	Rabu, 4 Maret 2020	Pemerintah Klaim Trans Papua Rampung 95 Persen	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat pembangunan jalan Trans Papua sudah mencapai 95 persen dari total Panjang proyek jalan, yaitu 2.345 kilometer. "Sekitar lebih-kurang 95 persen karena tinggal 26 kilometer lagi," kata Osman H. Marbun, Kepala Badai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Direktorat jenderal Bina Marga kementerian PUPR, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, kemarin.
6	Kompas Halaman 15	Rabu, 4 Maret 2020	Lahan Eks Ruko Jadi Ruang Terbuka Hijau	Pasca-ambruknya 10 rumah took di kompleks Pertokoan Jompo akibat longsor, Pemerintah Kabupaten Jember bakal meratakan 31 rumah took di sana yang menjadi aset pemerintah. Selanjutnya, lahan bekas ruko akan dijadikan ruang terbuka hijau. Di kompleks Pertokoan Jompo terdapat ratusan unit rumah toko (ruko) yang dibangun bertahap sejak tahun 1976. Sebanyak 31 ruko merupakan aset pemerintah yang ada di sempadan Sungai Jompo. "Cita-citanya, di sempadan sungai memang taka da bangunan yang berdiri, nanti setelah ditangani (dirobokkan dan ditata ulang), kami berencana menjadikan lahan itu sebagai ruang terbuka hijau yang bermanfaat," kata Bupati Jember Faida, Selasa (3/3/2020).

Judul	<b>Program Pembangunan Infrastruktuk PUPR 2020-2024</b>	Tanggal	Senin, 2 Maret 2020
Media	Media Indonesia Halaman 13		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan Rencana Strategis (Restra) dan Program kerja Pembangunan Infrastruktur 5 tahun ke depan. Hal itu dalam rangka melaksanakan visi Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Kabinet Indonesia Maju periode 2020 – 2024. Kelima visi Presiden tersebut ialah pembangunan sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi. "Kementerian PUPR, khususnya, akan melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti yang disampaikan Bapak Presiden, yakni melanjutkan dan menghubungkan apa yang telah kita bangun dengan Kawasan-kawasan khusus pariwisata, produksi, dan kawasan industri," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, di Gedung DPR/MPR Selasa (12/11/2019). Raker perdana bersama Komisi V DPR tersebut dipimpin Ketua Komisi V DPR DI Lasarus.		

## PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR 2020-2024

**PUPR Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur 2020-2024**

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan Rencana Strategis (Restra) dan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur 5 tahun ke depan. Hal itu dalam rangka melaksanakan visi Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Kabinet Indonesia Maju periode 2020 - 2024.

Kelima visi Presiden tersebut ialah pembangunan sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi. "Kementerian PUPR, khususnya, akan melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti yang disampaikan Bapak Presiden, yakni melanjutkan dan menghubungkan apa yang telah kita bangun dengan kawasan-kawasan khusus pariwisata, produksi, dan kawasan industri," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, di Gedung DPR/MPR Selasa (12/11/2019). Raker perdana bersama Komisi V DPR tersebut dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Menurut Basuki, di dalam Restra 2020-2024, Kementerian PUPR masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur. "Fokus pembangunan infrastruktur di periode kedua kementerian ini, di antaranya sumber daya air, jalan dan jembatan, pemukiman dan perumahan." (S1-25)

**Pembangunan 3.000 km jalan baru, antara lain:**

- Trans-Papua, Manokwari-Pegunungan Arfak.
- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) KED Galang Batang Kencana (Pulau) dan KED Bang (Sabah).
- Perbaikan dan Bandara Akses Palimbang (Lambar).
- Akses WTK Kusan Progn (DTP).
- Akses PLBN Yestekun (Papua) dan Sei Nyamak Nunukan (Kalantan).
- Kawasan Industri Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KPI) Tanah Kunung (Kalantan).
- Kawasan pariwisata, Jalan Bandara Internasional Lombok-Mandakia (NTB), Lükupang (Sulawesi), dan Lingkar Danau Toba.
- Jalan Lingkar Sorong-Pelabuhan Ara (Papua).
- Pemenuhan Misi Link Jalan Sambas-Tanjung (Kalbar), Nanga Pinoh (Kalbar), Tanjung Sembak (Kalangan), Gempang-Panau (Aceh).

**Pembangunan rumah tersebar di seluruh Indonesia, antara lain:**

- 25.000 unit rumah khas
- 1.500.000 unit rumah swadaya
- 500.000 unit psu perumahan

**Akses 90% terhadap air minum layak**

- Pemenuhan akses air minum layak melalui penyelesaian dan pembangunan SPAM Regional, SPAM KEC, dan SPAM Perkotaan dalam mendukung program 10 juta sambungan rumah.
- 50.000 Unit Rumah Suci.

**Pemanganan 10.000 ha kawasan kumuh**

- Teresbut di seluruh Indonesia.

**Akses 80% terhadap sanitasi dan persampahan, antara lain:**

- Penyelesaian dan pembangunan baru infrastruktur air limbah dan persampahan skala regional dan perkotaan.
- Air Limbah Kota Makassar (Sulawesi), Air Limbah Kota Pekanbaru (Riau).
- TPA Regional Kampar (Riau) dan TPA Regional Pesisir Selatan (Sumbar).

**Pembangunan 35.000 meter flyover/underpass, antara lain:**

- Pembangunan flyover/underpass di Jalan Rasional, FO Gase Subang (Sumbar), Underpass Kertimbang (DTP), FO Kopo (Lambar), FO Bandara Amnax Van Semarang (Jateng), start-up Mangrove-Sengaja (Bali).

**Ketersediaan 20 m3/detik air baku, antara lain:**

- Pemantapan 6 waduk: Waduk Karan (Banten), Gondong (Jateng), dan Logu (Jateng).
- Dukungan terhadap 2 SPAM Regional: SPAM Jember dan SPAM Bandung Raya (Lambar).
- Air baku perkotaan Serang (Kalbar).

**5.555 unit pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, dan pasar, antara lain:**

- Mendukung Papua Muda Inisiatif melalui Pembangunan Karan Maheswara Nusantara dan Istana Presiden.
- Mendukung PON Papua 2020: Arena Aquatic, arena Papua Badminton, Arena Criket, Lapangan Hockey Indoor dan Hockey Outdoor.
- Facilitas pendidikan: Sekolah, Madrasah, PT, dan FTIK.
- Pasar prioritas: Legi Solo (Jateng), Tenggerong (Kalimantan), dan Klaten (DTP).
- Renovasi Masjid Jember.

**1.000 embung, antara lain:**

- Embung Paman Pargan (Sumbar), Saraji (Dombak), Kelung Wau (Jateng), Buraken (Sulawesi), Woreh (Maluku), dan Raja Ampat (Papua Barat).

**60 m3/kapita/tahun**

- Peningkatan Kapasitas Daya Tangkap.

**Pembangunan 60 unit pembangunan, antara lain:**

- Penyelesaian 45 pembangunan lanjutan.
- Pembangunan 15 pembangunan baru: Saka Utara (Sumbar), Mangreh (Jambi), Peair Kopo (Banten), Muaro Juor (Kalangan), dan Kosek (NTB).

**Pengembangan 11 Kawasan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Terpadu, antara lain:**

- Penyelesaian pembangunan PLBN Terpadu: Jaga Baling (Kalbar) dan Sei Puncung (Kalantan).
- Pembangunan baru PLBN Terpadu: PLBN Depati dan Napos (NTB), Sei Kaka (Kalbar) dan Long Nawang (Kalantan).

**Rehabilitasi jaringan irigasi 2.500.000 ha, antara lain:**

- Di Selampang Sistem (Lampung), Di Bering dan Di Jember (Jateng), Di Dipan dan Di Manganti (Jateng), Di Wawotobi (Gorontalo), dan Di Gumbaka (Sulawesi).

**2.100 km pengendalian banjir dan penguatan pantai, antara lain:**

- Penguatan tanggul Medan (Sumbar), Bengkulu, DKI Jakarta, Bandung (Lambar), Pontianak (Kalbar), Palu (Sulawesi), dan Jayapura (Papua).
- Penguatan pantai Pantai Kurir (Lampung), Pantai Ulu Jawa Benuak (NKKD), dan Pulau Terluar.
- Dukungan vektor darang PON XX (Tulau Youtefa).

**Pembangunan 60.000 meter jembatan, antara lain:**

- Pemertanian jembatan panjang: Sumatra-Bangka (Sumbar dan Babar), Karan dan Bala-Bala (Kepulauan Riau), Pulau Batang (Kalimantan), Sembak Besar (Kalbar), dan Manukoban (Sabah).

**2.500 km jalan tol antara lain:**

- Tol Trans-Jawa.
- Tol Trans-Sumatra.
- Tol Jabodetabek.
- Tol Non-Trans-Jawa.

**Pembangunan jalan tol baru:**

- Tol Non-Trans-Jawa: Yogyakarta-Bawen, Citayun-Garut-Tasikmalaya.
- Tol Trans-Sumatra: Palembang-Tjati-Aji, Bukit-Angas, Bering Tiga-Dumai, Dumai-Rantau Prapat, Jambi-Rengas, Tobing Tiga-Pemangin-Sumera-Pangant, Pekanbaru-Bukittinggi-Padang.

**Sumber Daya Air**

**Konektivitas (Jalan dan Jembatan)**

**Pemukiman**

**Perumahan**

**Strategi Pembangunan Infrastruktur PUPR 2020-2024**

- Melakukan pembangunan infrastruktur (2019-2019) untuk mendukung pemenuhan visi Presiden Jokowi, ROK, dan Restra 5 tahun, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur.
- Meningkatkan kontribusi SDM, serta perbaikan tenaga kerja, termasuk dari program tes and match (teknis) yang memperhatikan aspek kompetensi dan nilai pendidikan.
- Mengembangkan strategi pembiayaan alternatif melalui sistem KPBU dan skema lainnya yang inovatif dan inovatif.
- Mempukul dan membuka peluang kerja bagi kontraktor nasional/lokal dengan melakukan pembelian melalui regulasi dan kebijakan pemaksimalan.
- Meningkatkan penggunaan material dan peralatan produksi dalam negeri yang memberikan nilai tambah dalam setiap infrastruktur yang terbangun sehingga dapat menggerakkan perekonomian.
- Menyederhanakan regulasi dan birokrasi, antara lain dengan revisi Permori PUPR yang mengantar.
- Mempertajam pengendalian barang dan jasa dengan diri agar infrastruktur dilaksanakan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas konstruksi.

Sumber: Kementerian PUPR

Judul	<b>PUPR Bangun Rumah Khusus</b>	Tanggal	Selasa, 3 Maret 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 7		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penanganan pasca kerusuhan di Wamena, Papua. Salah satu upayanya adalah melakukan pembangunan rumah khusus bagi warga yang menjadi korban. Dalam melaksanakan pembangunan rumah khusus tersebut, Kementerian PUPR bekerja sama dengan ZENI – TNI AD untuk membangun rumah tipe 36 sebanyak total 193 unit. Direktur Rumah Khusus Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Robert Marbun menyebutkan bahwa kerja sama yang dilakukan dengan ZENI-TNI AD adalah berupa kontrak swakelola tipe II.		

| PASCAKERUSUHAN WAMENA |

## PUPR Bangun Rumah Khusus

Bisnis, WAMENA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penanganan pasca-kerusuhan di Wamena, Papua. Salah satu upayanya adalah melakukan pembangunan rumah khusus bagi warga yang menjadi korban.

Dalam melaksanakan pembangunan rumah khusus tersebut, Kementerian PUPR bekerja sama dengan ZENI - TNI AD untuk membangun rumah tapak tipe 36 sebanyak total 193 unit.

Direktur Rumah Khusus Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Robert Marbun menyebutkan bahwa kerja sama yang dilakukan dengan ZENI-TNI AD adalah berupa kontrak swakelola tipe II.

"Jadi, dananya dari PUPR, ZENI yang eksekusi melakukan pembangunan," katanya ketika ditemui awak media di Wamena, Senin (2/3).

Adapun, penyelesaian pembangunan secara keseluruhan

diharapkan bisa selesai pada akhir Mei 2020 atau paling lambat Juli 2020.

Robert menjelaskan saat ini rumah khusus yang sudah dibangun sejumlah 20 unit dan 10 unit di antaranya sudah dihuni. Pada Januari, PUPR dan ZENI-TNI AD juga sudah mulai membangun 20 unit lagi secara bertahap.

"Karena ini bangunnya *planning by interest*, kami harus memastikan rumahnya nanti dihuni juga," sambung Robert.

Adapun, berdasarkan data Kementerian PUPR, hingga akhir Januari 2020, dari 20 unit yang sudah terbangun menelan nilai kontrak sebesar Rp12,69 miliar selama dua bulan pembangunan.

Progres pembangunannya hingga 17 Januari 2020 sudah mencapai 77,4%. Capaian ini masih kurang dari target 87,56%.

Salah satu penerima bantuan, Efrem Yawuan (57) yang merupakan seorang guru mengatakan sangat antusias

dengan adanya bantuan rumah dari pemerintah. Namun, Efrem menyebut bahwa dari rumah yang dibangun masih perlu adanya dapur.

"Rumahnya tidak seperti yang dulu saya tinggal, lebih besar. Sekarang kecil tetapi baik, bagus. Tapi ini dapat hanya rumah saja, semua, dan tidak ada dapur," katanya.

Efrem mewakili para korban mengharapkan untuk rancangan berikutnya agar diperhatikan untuk dibangun dapur supaya tidak menyulitkan penghuni.

"Jadi kalau mau lanjut ke tahap berikut harapannya ada dapur, karena kasihan kalau masuk tapi kesulitan tidak ada dapurnya," ungkapnya.

Kendati demikian, para korban sangat bahagia mendapat rumah pengganti yang terbakar saat kerusuhan pada 23 September 2019. Apalagi, kata Efrem, Kementerian PUPR menanggapi permohonan dari masyarakat dengan cukup cepat. (Mutiana Nabila)

Judul	<b>Kementerian PUPR Siapkan Program Infrastruktur 2021</b>	Tanggal	Selasa, 3 Maret 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 5		
Resume	Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menekankan bahwa pemrograman infrastruktur pada 2021 harus berkesinambungan dengan pelaksanaan program tahun sebelumnya. "Melanjutkan KSPN 2021, ini perlu diprogramkan di kongreg. Tahun ini ada lima yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, selesai 2020. Pada 2021 kita pindah, mungkin lima KSPN lagi. Misalnya, Wakatobi, Bromo, Toraja," ujar Basuki dalam arahannya di acara kongreg IV di Manado, Senin (2/3). Selain itu, kata Basuki, pihaknya juga melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan, seperti pembangunan bendungan dan jembatan. Basuki pun menargetkan penyelesaian 15 bendungan lagi sepanjang 2021.		



## Kementerian PUPR Siapkan Program Infrastruktur 2021

Bisnis, MANADO — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggelar Konsultasi Regional untuk merancang program infrastruktur tahun anggaran 2021 untuk kawasan Bali, Kalimantan, dan Sulawesi.

Salah satu fokus yang dibahas terkait dengan pengembangan infrastruktur untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Kegiatan yang digelar di Manado, Sulawesi Utara pada 2–4 Maret 2020 dan dibuka langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ini merupakan Konsultasi Regional (Konreg) IV atau yang terakhir dari rangkaian empat kota sebagai tuan rumah digelar Konreg tahun ini.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menekankan bahwa pemrograman infrastruktur pada 2021 harus berkesinambungan dengan pelaksanaan program tahun sebelumnya.

"Melanjutkan KSPN 2021, ini perlu diprogramkan di Konreg. Tahun ini ada lima yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, selesai 2020. Pada 2021 kita pindah, mungkin lima KSPN lagi. Misalnya, Wakatobi, Bromo,

Toraja," ujar Basuki dalam arahannya di acara Kongreg IV di Manado, Senin (2/3).

Selain itu, kata Basuki, pihaknya juga melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan, seperti pembangunan bendungan dan jembatan. Basuki pun menargetkan penyelesaian 15 bendungan lagi sepanjang 2021. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 65 pembangunan bendungan baru yang digarap sejak 2015.

Arahan selanjutnya yakni mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri.

"Ini melanjutkan infrastruktur yang sudah kita bangun. Jadi konsep pemrograman tidak berdiri sendiri. Misal, tol Manado—Bitung dihubungkan dengan KEK atau pariwisata lain. Kalau keluar tol apakah jalan nasional, jalan provinsi,

atau kabupaten. Kalau itu menghubungkan kawasan khusus, APBN bisa masuk," jelasnya.

Selain itu, Kementerian PUPR juga menargetkan lebih banyak lagi rehabilitasi sekolah. Menurut Basuki, perbaikan sarana dan prasarana sekolah ini dalam rangka menjalankan visi Presiden Joko Widodo untuk membangun sumber daya manusia (SDM) dalam 5 tahun ke depan.

Program perbaikan sekolah saat ini telah dialihkan ke Kementerian PUPR agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa lebih fokus dalam program belajar mengajar.

### PERENCANAAN TERPADU

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur PUPR pada 2021 dilakukan berdasarkan perencanaan terpaduan pembangunan infrastruktur berbasis pengem-



Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memaparkan program infrastruktur tahun anggaran 2021 untuk wilayah Bali, Kalimantan, dan Sulawesi dalam acara Konsultasi Regional IV di Manado, Senin (2/3). Salah satu fokus pemrograman infrastruktur tahun depan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional.

banagan wilayah dan penataan ruang.

Selain itu, sambungnya, juga memperhatikan arahan Agenda Pembangunan Global dan potensi daya dukung wilayah yang tangguh terhadap bencana. Pihaknya berharap dari program yang dibuat dapat terrealisasi dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun Konreg ini diikuti oleh sebanyak 12 provinsi yang berada di kawasan Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Ke-12 provinsi tersebut adalah Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.

Peserta Konreg tahun ini terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, Dinas Bidang PUPR (Dinas Kebinayaga Provinsi, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air/Pengairan Provinsi, dan Dinas Terkait Perumahan Provinsi), serta Balai di Lingkungan Ditjen

Sumber Daya Air (Balai Besar Wilayah Sungai).

Peserta lainnya berasal dari unsur Balai dan Satker di Lingkungan Ditjen Bina Marga (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional), Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya (Balai Prasarana Permukiman Wilayah), dan Satker di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan (SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi).

Kemudian ada peserta mewakili Unit Organisasi/Ditjen Kementerian PUPR yakni Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Setjen PUPR, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan BPIW, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur.

pada 24–26 Februari.

Adapun Konreg digelar dengan tiga tujuan. *Pertama*, menyusun program 2021 yang akurat, terpadu, dan dapat dilaksanakan sesuai *readiness criteria* dalam rangka memantapkan ketahanan pangan, sumber daya air, dan energi.

Tujuan *kedua* yakni sinkronisasi program Kementerian PUPR dengan disepakati dan didukung oleh Penda serta kementerian/ lembaga terkait. Selanjutnya, tujuan *ketiga* sebagai bahan penyusunan usulan Kementerian PUPR untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021.

Pagelaran Konreg yang dihadiri kurang lebih 600 jiwa tersebut juga membawa berkah bagi perekonomian Bumi Nyiur Melambai. Oleh karena itu, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey turut menyambut gembira penyelenggaraan Konreg PUPR di Manado.

"Kami bersyukur karena Sulut dipilih untuk menyelenggarakan konreg ini. Artinya, banyak yang datang sehingga aktivitas hotel bergairah," katanya yang juga turut menghadiri acara tersebut.



Menteri PUPR bersama Kepala BPIW dan peserta Konreg saat Pembukaan Konsultasi Regional Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Bali di Manado 2 Maret 2020.

Judul	Akankah Disparitas Harga Berkurang?	Tanggal	Rabu, 4 Maret 2020
Media	Bisnis Indonesia halaman 21		
Resume	Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartato mengatakan bahwa Trans-Papua yang merupakan jalan Nasional bukan tol sudah menjadi program pemerintah sejak dulu. "Jalan Trans-Papua sudah program dari dulu, untuk membuka keterisolasian sekaligus konektivitas. [Harapannya] supaya segera tersambung sehingga diharapkan tidak terlalu besar disparitas harga," katanya kepada Bisnis di Jakarta, Selasa (3/3). Jalan nasional Trans-Papua sepanjang 4.330 kilometer (km) berada di dua provinsi, yakni Papua dan Papua barat. Di Papua Barat jalan yang dibangun adalah sepanjang 1.070,55 km, sedangkan di Papua 3.259,45 km.		

| JALAN NASIONAL TRANS-PAPUA |

# AKANKAH DISPARITAS HARGA BERKURANG?

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan mengharapkan agar tersambung jalan nasional Trans-Papua dapat menekan disparitas harga di daerah tersebut.

Agne Yasa  
redaksi@bisnis.com

**D**irektur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartato mengatakan bahwa Trans-Papua yang merupakan jalan nasional bukan tol sudah menjadi program pemerintah sejak dulu. "Jalan Trans-Papua sudah program dari dulu, untuk membuka keterisolasian sekaligus konektivitas. [Harapannya] supaya segera tersambung sehingga diharapkan tidak terlalu besar disparitas harga," katanya kepada *Bisnis* di

Jakarta, Selasa (3/3). Jalan nasional Trans-Papua sepanjang 4.330 kilometer (km) berada di dua provinsi, yakni Papua dan Papua Barat. Di Papua Barat jalan yang dibangun adalah sepanjang 1.070,55 km, sedangkan di Papua 3.259,45 km. Di Provinsi Papua, jalan tersebut membentang di Wamena—Habema—Kenyam—Mamugu (284,30 km), Kwatisore (batas Provinsi Papua)—Nabire (203,32 km), Naitire—Wagete—Enarotali (275,50 km), Enarotali—Muli—Wamena (513,40 km), Wa-

mena—Elelim—Jayapura (585 km), Kenyam—Dekai (275,83 km), Dekai—Oksibil (231,60 km), Oksibil—Waropko (135,01 km), Waropko—Tanah Merah—Merauke (533,06 km), dan Wagete—Timika (222,43 km). Di Papua Barat meliputi Sorong—Maybrat—Manokwari (594,81 km) dan Manokwari—Mameh—Wasior—Batas Provinsi Papua (475,81 km).

Sementara itu, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan bahwa keberadaan jalan Trans-Papua memang diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, tentunya, untuk mendorong percepatan memang harus diiringi

“**Ini lebih banyak pada konteks pemerataan pembangunannya.**”

dengan pembangunan wilayah. Menurutnya, sekarang ini jalan Trans-Papua hanya dibuat untuk angkutan logistik yaitu guna menekan biaya supaya tidak ada kenaikan yang terlalu tinggi. "Supaya tidak ada hal-hal yang membuat biaya logistik itu menjadi lebih mahal. Tidak ada biaya logistik itu membuat barang tidak terdistribusi. Jadi, ini lebih banyak pada konteks pemerataan pembangunannya, tapi untuk pertumbuhan mungkin belum lah karena dia *by process*. Namun, untuk pemerataan, keadilan, *oke* bisa dipenuhi, tapi dalam konteks pertumbuhan wilayah sangat dipengaruhi oleh daya tarik kawasan," jelasnya kepada *Bisnis*, Selasa (3/2).

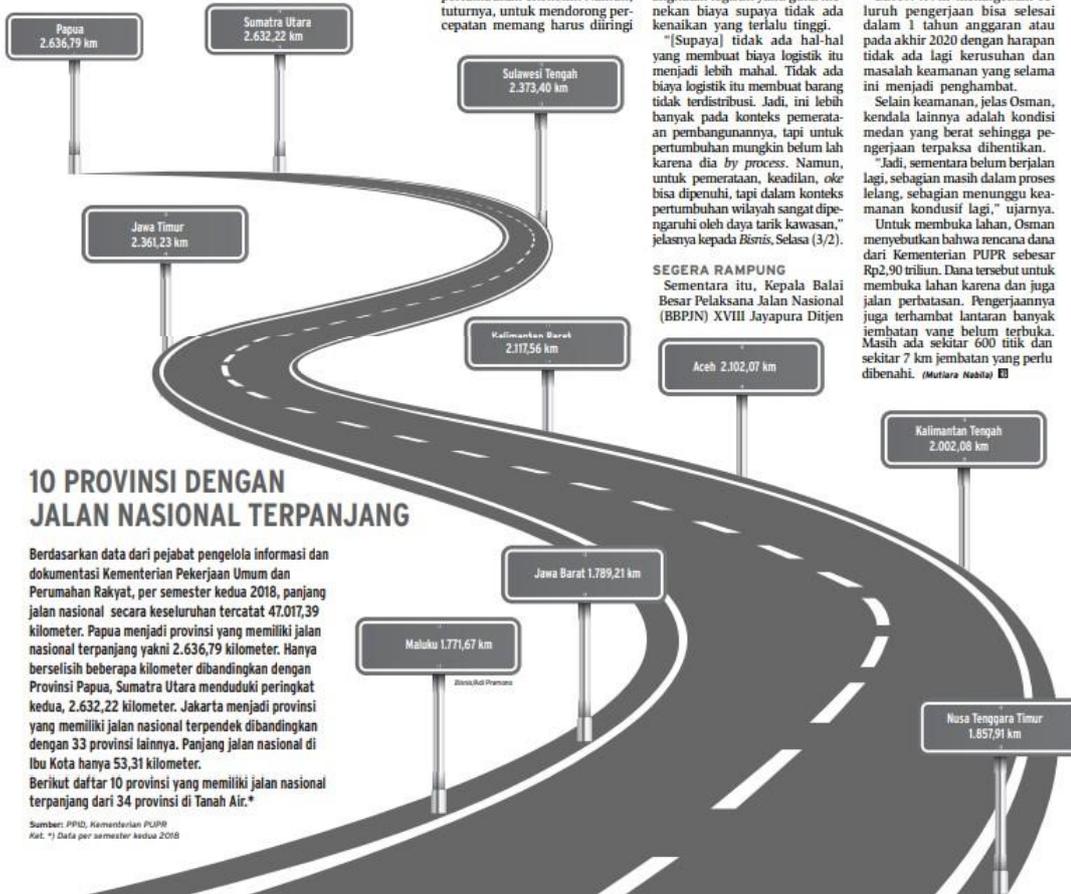
**SEGERA RAMPUNG**  
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura Ditjen

Bina Marga Kementerian PUPR Osman H. Marbun mengatakan bahwa pembangunan jalan nasional Trans-Papua diperkirakan bisa diselesaikan pada akhir tahun ini dengan progres pengerjaan yang sudah mencapai lebih dari 95%.

Saat ini, lanjutnya, sisa pengerjaannya tinggal 26 kilometer dari total 2.345 km. "itu 26 kilometer di antaranya di ruas Enarotali—Sugata 4 kilometer, Sina Ilaga 5,50 kilometer, kemudian ruas Kenyam—Dekai itu masih 16 kilometer. Ini masih belum terbuka lahannya," kata Osman di Wamena, Papua, Selasa (3/3). BBPJN XVIII menargetkan seluruh pengerjaan bisa selesai dalam 1 tahun anggaran atau pada akhir 2020 dengan harapan tidak ada lagi kerusakan dan masalah keamanan yang selama ini menjadi penghambat.

Selain keamanan, jelas Osman, kendala lainnya adalah kondisi medan yang berat sehingga pengerjaan terpaksa dihentikan.

"Jadi, sementara belum berjalan lagi, sebagian masih dalam proses lelang, sebagian menunggu keamanan kondusif lagi," ujarnya. Untuk membuka lahan, Osman menyebutkan bahwa rencana dana dari Kementerian PUPR sebesar Rp2,90 triliun. Dana tersebut untuk membuka lahan karena dan juga jalan perbatasan. Pengerjaannya juga terhambat lantaran banyak jembatan yang belum terbuka. Masih ada sekitar 600 titik dan sekitar 7 km jembatan yang perlu dibangun. (Mutlira Nabila)



Berdasarkan data dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, per semester kedua 2018, panjang jalan nasional secara keseluruhan tercatat 47.017,39 kilometer. Papua menjadi provinsi yang memiliki jalan nasional terpanjang yakni 2.636,79 kilometer. Hanya berselisih beberapa kilometer dibandingkan dengan Provinsi Papua, Sumatra Utara menduduki peringkat kedua, 2.632,22 kilometer. Jakarta menjadi provinsi yang memiliki jalan nasional terpendek dibandingkan dengan 33 provinsi lainnya. Panjang jalan nasional di Ibu Kota hanya 53,31 kilometer. Berikut daftar 10 provinsi yang memiliki jalan nasional terpanjang dari 34 provinsi di Tanah Air.\*

Sumber: PPIID, Kementerian PUPR  
Ket. \*) Data per semester kedua 2018

Judul	<b>Pemerintah Klaim Trans Papua Rampung 95 Persen</b>	Tanggal	Rabu, 4 Maret 2020
Media	Tempo halaman Peristiwa 3		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat pembangunan jalan Trans Papua sudah mencapai 95 persen dari total Panjang proyek jalan, yaitu 2.345 kilometer. "Sekitar lebih-kurang 95 persen karena tinggal 26 kilometer lagi," kata Osman H. Marbun, Kepala Badan Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Direktorat jenderal Bina Marga kementerian PUPR, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, kemarin.		

## LONGSOR JEMBER

# Lahan Eks Ruko Jadi Ruang Terbuka Hijau

**JEMBER, KOMPAS** — Pasca-ambruknya 10 rumah toko di kompleks Pertokoan Jompo akibat longsor, Pemerintah Kabupaten Jember bakal meratakan 31 rumah toko di sana yang menjadi aset pemerintah. Selanjutnya, lahan bekas ruko akan dijadikan ruang terbuka hijau.

Di kompleks Pertokoan Jompo terdapat ratusan unit rumah toko (ruko) yang dibangun bertahap sejak 1976. Sebanyak 31 ruko merupakan aset pemerintah yang ada di sempadan Sungai Jompo.

"Cita-citanya, di sempadan sungai memang tak ada bangunan yang berdiri. Nanti setelah ditangani (dibongkar dan ditata ulang), kami berencana menjadikan lahan itu sebagai ruang terbuka hijau yang bermanfaat," kata Bupati Jember Faida, Selasa (3/3/2020).

Faida berharap, ruang terbuka hijau tersebut bisa mengubah wajah Jember menjadi lebih indah. Lokasi tersebut juga akan dirancang agar menjadi tujuan wisata. Pemanfaatan lahan menjadi ruang terbuka hijau diharapkan juga membuat

perawatan sungai lebih mudah sehingga potensi bahaya bisa dikurangi.

Terkait bangunan ruko lain yang bukan aset Pemkab Jember, serta rumah warga di sisi lain sungai, Faida masih enggan merinci detailnya. "Kami akan robohkan dan tangani dulu bangunan yang masuk dalam aset Pemkab Jember," ujarnya.

Usulan pembangunan ruang terbuka hijau juga disampaikan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Achmad Subki. Jalan Sultan Agung yang ikut tergerus harus dikembalikan seperti semula untuk mendukung pembangunan ruang terbuka hijau.

"Lebih baik memang dijadikan ruang terbuka hijau. Jalan Sultan Agung dipertahankan selebar 14 meter, sedangkan sisanya bisa dijadikan ruang terbuka hijau," ujarnya.

Subki menuturkan, permukiman warga yang berdiri sebelum ada Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sem-

padan Sungai dan Garis Sempadan Danau seharusnya juga turut ditata untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Namun, ia sadar tidak mudah memindahkan warga yang sudah lama tinggal di lingkungan tersebut.

Dosen Teknik Sipil Universitas Jember dengan bidang keahlian sumber daya air Entin Hidayat mendukung rencana pembangunan ruang terbuka hijau. "Daripada dijadikan lahan parkir untuk pusat pertokoan, pembangunan ruang terbuka hijau di lahan eks ruko yang ambruk jauh lebih bermanfaat. Namun, memang perlu dilakukan kajian yang utuh tentang daya tampung dan debit sungai sebelum merancang ruang terbuka hijau," ujarnya.

Keberadaan pepohonan di ruang terbuka hijau, menurut Entin, memproteksi bantaran sungai dari potensi longsor. Sungai yang selama ini tertutup ruko menjadi lebih tampak sehingga kondisi dan kebersihannya terpantau. Ruang terbuka hijau menambah keindahan dan menjadi ruang interaksi sosial. (GER)

Judul	Lahan Eks Ruko Jadi Ruang Terbuka Hijau	Tanggal	Rabu, 4 Maret 2020
Media	Kompas Halaman 15		
Resume	Pasca-ambruknya 10 rumah took di kompleks Pertokoan Jompo akibat longsor, Pemerintah Kabupaten Jember bakal meratakan 31 rumah took di sana yang menjadi aset pemerintah. Selanjutnya, lahan bekas ruko akan dijadikan ruang terbuka hijau. Di kompleks Pertokoan Jompo terdapat ratusan unit rumah toko (ruko) yang dibangun bertahap sejak tahun 1976. Sebanyak 31 ruko merupakan aset pemerintah yang ada di sempadan Sungai Jompo.		

## PERISTIWA

# Pemerintah Klaim Trans Papua Rampung 95 Persen

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat pembangunan jalan Trans Papua sudah mencapai 95 persen dari total panjang proyek jalan, yaitu 2.345 kilometer.

EDISI, 4 MARET 2020

**WAMENA** - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat pembangunan jalan Trans Papua sudah mencapai 95 persen dari total panjang proyek jalan, yaitu 2.345 kilometer.

"Sekitar lebih-kurang 95 persen karena tinggal 26 kilometer lagi," kata Osman H. Marbun, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, kemarin.



## Baca Juga

by Doble

- Pembebasan Lahan Jalan Tol Trans Jawa Baru 82 Persen - Ekonomi dan...
- Perencanaan Konstruksi Akses Pelabuhan Patimban Diperketat - ...
- Direktur Utama PT Waskita Karya, I Gusti Ngurah Putra: Tiap Bangun...
- Jokowi Umumkan Empat Calon Kepala Badan Otoritas Ibu Kota - Nasional
- Rugi Berlipat Kereta Cepat - Editorial
- Pemerintah Kebut Proyek Jalan Bandara Kertajati - Ekonomi dan...

Osman menjelaskan, 26 kilometer jalan yang belum terbangun itu tersebar di tiga titik, yakni 4 kilometer yang berada pada trase Enarotali-Sugapa, lalu ruas Sina-Ilaga mencapai 5,5 kilometer, dan terakhir pada trase Dekai-Kenyam sekitar 16 kilometer.

Ia juga mengatakan pembangunan jalan Trans Papua belum dilanjutkan karena faktor keamanan yang belum normal. Untuk beberapa ruas bahkan masih dalam proses lelang. "Selain kondisi medan yang berat, kondisi keamanan menyebabkan kami berhenti," ucapnya. Prediksinya, pembangunan jalan ini bisa rampung pada akhir 2020.